

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Kesimpulan**

1. PADes tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja desa bidang pembangunan Kabupaten Lahat. Kondisi tersebut disebabkan karena jumlah PADes kecil dan seragam sehingga tidak memungkinkan bagi pemerintah desa untuk mengalokasikan PADes kedalam belanja desa bidang pembangunan.
2. DD berpengaruh signifikan dengan arah positif terhadap belanja desa bidang pembangunan Kabupaten Lahat. Semakin tinggi DD, maka belanja desa bidang pembangunan akan semakin meningkat. Hal ini disebabkan prioritas penggunaan DD diarahkan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan berskala lokal desa bidang pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa dalam rangka menekan angka kemiskinan.
3. ADD berpengaruh signifikan dengan arah positif terhadap belanja desa bidang pembangunan Kabupaten Lahat. Semakin tinggi ADD, maka belanja desa bidang pembangunan akan semakin meningkat. Hal ini disebabkan ADD juga memiliki tujuan dan digunakan untuk menambah dan meningkatkan sarana dan prasarana fisik dan non fisik melalui alokasi dasar, dimana peningkatan tersebut cenderung digunakan untuk pembangunan fisik infrastruktur desa.
4. BHPR tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja desa bidang pembangunan Kabupaten Lahat. Hal ini disebabkan tumpang tindih (*overlapping*) regulasi di tingkat pusat dan daerah yang membuat pemerintah desa tidak diperbolehkan mengalokasikan BHPR kedalam belanja desa bidang pembangunan karena bukan prioritas utama penggunaan BHPR di desa-desa Kabupaten Lahat.
5. PADes, DD, ADD dan BHPR secara bersama-sama (simultan) berpengaruh signifikan terhadap belanja desa bidang pembangunan. Semakin tinggi PADes, DD, ADD dan BHPR maka akan semakin besar pula belanja desa

yang bisa digunakan untuk pembangunan desa. Semua variabel independen berpengaruh signifikan terhadap belanja desa bidang pembangunan di Kabupaten Lahat dengan nilai koefisien determinasi sebesar 0,452 (45,2%) dan sisa 0,548 (54,8%) dijelaskan oleh variabel lain diluar penelitian ini.

## **5.2 Saran**

1. Pemerintah Kabupaten Lahat diharapkan dapat menelaraskan dan menyesuaikan regulasi daerah dan pusat agar dapat memberikan kepastian hukum yang jelas terkait pengelolaan BHPR oleh pemerintah desa.
2. Pemerintah desa di Kabupaten Lahat diharapkan dapat meningkatkan pengelolaan keuangan desa terutama PADes melalui pengembangan BUMDes agar dapat memenuhi kebutuhan belanja desa secara mandiri dan meminimalisir ketergantungan terhadap pemerintah daerah maupun pusat.
3. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat menggunakan variabel dependen yang lebih spesifik seperti belanja bidang pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, pertanian dan seterusnya. Penambahan variabel independen yang lebih spesifik pula seperti jumlah panjang jalan yang dimiliki desa, luas wilayah, jumlah irigasi, jumlah murid PAUD, jumlah sawah, jumlah penduduk dan jumlah sarana kesehatan juga sangat disarankan agar mampu memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen. Selain itu disarankan untuk menambah jangka waktu dan objek penelitian guna meningkatkan keakuratan kualitas hasil penelitian.